

Selasa, 25 Juli 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Generali Indonesia Ajak Masyarakat Kota Surabaya Peduli Kesehatan
Nama Media	Bhirawa
Newstrend	Generali Indonesia Hadir sebagai official Insurance Partner Borobudur Marathon 2023
Halaman/URL	Pg12
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Generali Indonesia Ajak Masyarakat Kota Surabaya Peduli Kesehatan

Surabaya, Bhirawa

Hadir sebagai official insurance partner Borobudur Marathon 2023, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bekerja sama dan mendukung lomba lari berskala internasional yang akan diselenggarakan pada 19 November 2023 mendatang untuk ke 6 kalinya sejak tahun 2018.

Sebagai mitra resmi asuransi, Generali Indonesia siap memberikan proteksi kepada 10 ribu pelari Borobudur Marathon 2023 dalam bentuk proteksi jiwa dan kesehatan jika para pelari mengalami kecelakaan saat berlari. Dengan proteksi ini, para pelari akan mendapatkan rasa aman dan tidak perlu khawatir saat terjadi risiko kecelakaan ketika mengikuti Borobudur Marathon serta dapat fokus mencapai garis finish.

Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Vivin Arbi Gautama mengungkapkan dengan menga-

ngkat tema tahun ini 'Voice of Unity', Borobudur Marathon mengajak masyarakat untuk saling menginspirasi dengan menyuarakan hal-hal positif demi membangun persatuan. Sejalan dengan tema ini, melalui dukungannya, Generali Indonesia juga ingin secara konsisten menyuarakan hidup sehat sejak dini sebagai bekal masa depan.

Selain itu, untuk meminimalisir risiko hidup yang mungkin terjadi di masa mendatang, Generali Indonesia juga kembali menyuarakan pentingnya proteksi jiwa dan kesehatan untuk diri serta keluarga.

"Merupakan kebanggaan bagi kami kembali hadir menjadi bagian dari Borobudur Marathon 2023. Lari memang terlihat olahraga yang mudah dan digemari banyak orang, namun bukan berarti lari marathon bebas dari risiko dan untuk itu sebaiknya kita memiliki persiapan penuh. Sama seperti mengikuti ajang

marathon, hidup juga butuh persiapan matang agar terus bisa meraih mimpi-mimpi dalam kehidupan. Di ajang ini, suatu kebahagiaan bagi kami bisa memberikan perlindungan kepada pelari agar mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka saat mengikuti race dan mencetak personal best," terangnya usai mengikuti Borobudur Marathon 2023 di Alun-Alun Surabaya, Minggu (23/7).

Vivin menambahkan sebagai rangkaian Borobudur Marathon 2023, fun run Friendship Run 5K hadir di 10 kota di Indonesia. Setelah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta, hari ini Friendship Run digelar di Surabaya, serta selanjutnya akan diselenggarakan di kota Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Medan dan Palembang.

Dalam acara ini, Generali Indonesia juga turut hadir memeriahkan acara dengan menyediakan mini medical check up gratis bagi pelari



Generali Indonesia menyediakan mini medical check up gratis bagi pelari dan pengunjung di Borobudur Marathon 2023 di Alun-Alun Surabaya.

dan pengunjung serta membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelari yang ingin mengetahui proteksi Generali lebih detail.

Dukungan pada Borobudur Mar-

athon 2023 juga menjadi bagian dari wujud value Generali, live the community, yang berarti Generali bergerak aktif tumbuh bersama masyarakat dan komunitas dimana

Generali berada, yang dalam hal ini masyarakat untuk hidup fit dan bugar di tengah risiko yang masih tinggi. [riq.bb]

Judul	Ekuitas Minimum Rp 100 Miliar
Nama Media	Padang Ekpress
Newstrend	Penerbitkan aturan terkait pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan reasuransi
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Ekuitas Minimum Rp 100 Miliar

Syarat Pemisahan Unit Syariah Asuransi dan Reasuransi

Jakarta, Padek—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terkait pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan reasuransi. Pemisahan bisa dilakukan atas inisiatif perusahaan atau kewenangan regulator dalam rangka konsolidasi. Sehingga semakin memperkuat pengatur dan pengawasan industri perasuransian.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11/2023. "Melalui POJK ini diharapkan pelaksanaan pemisahan unit syariah dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, mewujudkan tujuan tercipta industri asuransi syariah dan reasuransi syariah yang tumbuh secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis dan peserta," ucap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, akhir pekan lalu.

Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila unit syariah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Yakni, nilai dana *tabarru'* (dana yang dikumpulkan dari peserta membayar iuran se-

tiap bulan) dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Lalu, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp 100 miliar untuk unit syariah perusahaan asuransi dan Rp 200 miliar bagi unit syariah perusahaan reasuransi. "Pemisahan juga dilakukan atas permintaan sendiri (inisiatif) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi," terang Aman.

Bentuk pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah baru diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan. Atau, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Aman menegaskan, perusahaan yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan paling lambat 31 Desember 2026. Dengan harapan, setelah batas waktu tersebut sudah tidak ada lagi unit syariah yang beroperasi di industri asuransi dan reasuransi.

Sementara itu, Chief Marketing Officer (CMO) Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama mengatakan, pertumbuhan industri asuransi masih stabil. Disebutkan, laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Syarat:

- Nilai dana *tabarru'* dan dana investasi minimal 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta perusahaan induk.
- Ekuitas minimum unit syariah Rp 100 miliar untuk unit syariah perusahaan asuransi dan Rp 200 miliar bagi unit syariah perusahaan reasuransi.
- Jika belum memenuhi persyaratan, ekuitas minimum penambahan bisa berasal dari pemegang saham, investor baru, dan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah.

Bentuk pemisahan unit syariah:

- Mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru.
- Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah.

Sumber: POJK 11 Tahun 2023

(AAJI) mengenai populasi rekening per kuartal I 2023 mencapai 87,54 juta. "Pertumbuhannya mencapai 16,6 persen secara *year on year*," tuturnya di Surabaya kemarin (23/7).

Generali mencatat penggunaan manfaat asuransi juga meningkat. Per Juni 2023, klaim mencapai Rp 528,3 miliar untuk 121 ribu kasus. Khusus, Jatim berkontribusi sebanyak 12 persen dengan total nilai Rp 64,3 miliar.

"Klaim terbanyak untuk perusahaan kami merupakan pasien penyakit akut seperti demam berdarah, diare dan ISPA (infeksi saluran pernapasan akut)," jelasnya. (han/bil/dio/jpg)

Judul	Kejagung Tangani Perkara Korupsi Capai Rp 152 Triliun
Nama Media	Jambi Independent
Newstrend	Gambaran kinerja jajaran kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi
Halaman/URL	Pg12 dan 11
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Kejagung Tangani Perkara Korupsi Capai Rp 152 Triliun

JAKARTA – Kejaksaan Agung RI merilis gambaran kinerja jajaran kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi, hingga semester pertama tahun 2023, bidang pidana khusus (Pidsus) menangani perkara dengan kerugian negara sebesar Rp152,2 triliun memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)

Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan nilai tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah perkara yang ditangani Bidang Pidsus tahun lalu hingga saat ini.

"Total kerugian negara yang berhasil ditangani Rp152,247 triliun dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat," kata Ketut.

Ia menjelaskan, beberapa perkara korupsi mega korupsi sedang ditangani jajaran Pidsus Kejaksaan Agung seperti proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) senilai Rp8,32 triliun, korupsi ekspor CPO atau minyak goreng Rp 6,47 triliun.

Kemudian perkara korupsi yang ditangani tahun lalu

yang masih dalam proses upaya hukum seperti Duta Palma Grup, Jiwasraya, LPEI dan lainnya.

Ketut juga menyampaikan, Bidang Pidsus Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 3.397 perkara dalam tahap eksekusi, dan 3.923 perkara di tahap penuntutan.

"Juga ada 2.117 perkara telah diselesaikan di tahap penyidikan," katanya. ■

Baca *Kejagung* hal 11

Kejagung Tangani Perkara Korupsi Capai Rp 152 Triliun

----- dari hal 12

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu merincikan total kerugian negara yang berhasil di tangani Rp152,24 triliun dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat meliputi: pertama, mengembalikan kerugian keuangan negara Rp42,70 triliun, dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat.

Kedua, mengembalikan kerugian perekonomian

negara Rp109,5 triliun, yang bersumber dari perkara PT AMU, LPEI, Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma Grup, Taspen dan BTS 4G Kominfo.

Selanjutnya, mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,82 triliun, serta penyelamatan dan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya Rp1,1 triliun.

Sementara itu di Bidang Pembinaan atau pemulihan aset Kejaksaan Agung menyelesaikan barang rampasan negara dan benda sitaan negara mencapai Rp4,88 triliun, penelusuran, pengamanan dan penyelesaian aset Rp 5 triliun, serta pendampingan dan pemulihan aset kementerian/lembaga sebesar Rp66,3 miliar. Selain Bidang Pidum,

kinerja bidang Perdana dan Tata Usaha (Datun) Kejaksaan Agung menangani 35.826 perkara penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, mewakili kepentingan umum dalam rangka penegakan hukum.

"Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan di Bidang Datun sebesar Rp271,5 triliun dan 11.874.569,63 dollar Amerika Serikat," katanya.

Datun juga berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp45,5 triliun dan 1.773.538,55 dollar Amerika Serikat.

Kemudian kinerja di Bidang Pidana Militer (Pidmil), Kejagung melaksanakan koordinasi teknis penuntutan dilakukan Oditur Militer sebanyak 545 perkara. Terdapat 10 perkara ta-

hap penyelidikan, empat perkara tahap penyidikan dan empat perkara di tahap penuntutan.

Pada acara puncak peringatan HBA ke-63 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Presiden meng- ingatkan peran Kejaksaan RI untuk mempertahankan dan mengembalikan aset negara sangat penting.

"Peran jaksa sebagai pen-

gacara negara juga sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, mempertahankan aset negara," kata Presiden Jokowi dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa di Jakarta, Sabtu. (ANTARA)

Judul	Komjak Minta Kejagung Tak Gentar Ungkap Mega Kasus Korupsi
Nama Media	Sinar Indonesia Baru
Newstrend	Penanganan Perkara Korupsi Kejagung
Halaman/URL	Pg 1 dan 10
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	negative

Komjak Minta Kejagung Tak Gentar Ungkap Mega Kasus Korupsi

Jakarta (SIB)

Kejaksaan Agung diminta tidak gentar menindak tegas dan menangani kasus korupsi

besar seperti Jiwasraya, Asabri, ekspor minyak goreng, hingga mafia tanah.

"Kejasaan Agung harus

konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hu-

Lanjut ke Hal 10 Kol 3

Komjak Minta Kejagung-----

kum terhadap kasus kasus megakorupsi," ujar anggota Komisi Kejaksaan Barita Si-manjuntak di Jakarta, Minggu (23/7) merespons pidato Presiden Joko Widodo dalam Hari Bakti Adhyaksa ke-63.

Barita sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan seperti halnya disampaikan Presiden Jokowi dimana capaian kinerja Kejaksaan paling tinggi mendapatkan kepercayaan publik di antara penegak hukum lainnya.

"Ini sangat penting karena era penegakan hukum modern sudah bergeser tidak lagi hanya berdam-pak pada kewenangan pelaksanaan tugas saja,

tapi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam penegakan hukum," terang Barita.

Komisi Kejaksaan, kata Barita sebagai lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang, menilai ada perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia menyebut restorative justice mulai diterapkan Kejaksaan. "Dalam skop masyarakat kecil akses keadilan kepada rakyat kecil itu dirasakan melalui visi Burhanuddin sebagai Jaksa Agung penerapan restorative justice (RJ). Ini cukup signifikan menyele-

saikan kasus-kasus sederhana yang memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk bisa terlibat dalam pemulihan keadaan," tegas Barita.

Berdasarkan catatan Komisi Kejaksaan, menurut Barita, ada lebih dari 2000 perkara yang diselesaikan melalui RJ oleh Kejaksaan dalam kurun waktu 2 tahun.

Mengenai pesan presiden agar jangan ada pihak di Kejaksaan yang bermain proyek, Barita mengatakan peran jaksa adalah melakukan pendampingan agar tidak ada penyimpangan dalam program pembangunan. "Yang harus dilakukan menjaga, mendampingi supaya tidak ada kebocoran atau penyimpangan serta menindaknya kalau ada pelanggaran, jangan malah ikut-ikutan, itu yang secara khusus disampaikan Pak Presiden," ujar Barita.

Untuk mengawasi jaksa agar tidak terlibat proyek, Komisi Kejaksaan, terang Barita membuka layanan pengaduan secara daring. Nantinya laporan itu akan diteruskan pada unit satuan dalam kejaksaan seperti pengawasan, pembinaan yang langsung ditangani oleh jaksa agung.

"Masyarakat tak usah takut melapor kita pastikan kita tindak dan kita teruskan pengawasannya supaya berjalan dengan baik," jelas Barita. (BRR/c)

Judul	Komjak Ingatkan Kejaksaan Agung Tindaklanjuti Harapan Presiden
Nama Media	Harian Terbit
Newstrend	Penanganan Perkara Korupsi Kejaksaan
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Komjak Ingatkan Kejaksaan Agung Tindaklanjuti Harapan Presiden

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjutak mengingatkan jajaran Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat, yang disampaikan pada puncak Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 pagi tadi.

"Yang diwanti-wanti Presiden tadi, mempertahankan apalagi meningkatkan itu jauh lebih sulit, karena itu dibutuhkan kebersamaan dari seluruh elemen kejaksaan untuk bahu-membahu menjaga kepercayaan itu," kata Barita kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Barita menilai capaian kinerja Kejaksaan Agung terbaik di sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, dengan mendapat penilaian tingkat kepercayaan paling

tinggi di antara lembaga penegakan hukum lainnya di Indonesia.

Menurut dia, tingkat kepercayaan masyarakat ini penting karena di era penegakan hukum modern sudah bergeser paradigma, bahwa lembaga penegak hukum tidak hanya berdampak pada kewenangan pelaksana tugas saja, tapi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam penegakan hukum yang akan menumbuhkan kepercayaan pada penegakan hukum itu sendiri dan kepada pemerintah.

"Di sinilah tadi Pak Jokowi menggarisbawahi apresiasi atas capaian terbaik disepanjang sembilan tahun ini," kata Barita.

Memberikan Keteladanan

Sebagai pengawas eksternal, Komjak yang bertugas berdasarkan UU Kejaksaan melihat capaian

kinerja Kejaksaan Agung di era kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan keteladanan dalam artian tegas dan tidak kompromis kepada segala bentuk pelanggaran penindakan.

Dalam penanganan kasus, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung juga menangani kasus-kasus mega korupsi seperti Jiwasraya, ASABRI, Garuda, minyak goreng, BTS 4G Kominfo, mafia tanah dan lainnya semua ditindak secara tegas.

"Jaksa Agung mengimplementasikan pesan Pak Jokowi pada waktu Hari Bhakti Adhyaksa dua tahun lalu. Belai menyatakan kejaksaan adalah wajah hukum penegakan hukum di Indonesia," katanya.

Pesan Presiden itu, kata Barita, diimplementasikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin secara tegas, konsisten dan terukur,

sehingga dari tahun 2019 hingga 2023 ini tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung terus meningkat. Bila pada September 2022 lalu sebesar 77 persen, di bulan Juni 2023 menjadi 81,2 persen.

Barita berpandangan, ketegasan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus-kasus mega korupsi dilihat oleh masyarakat. Karena, apabila penegakan hukum tersebut tidak ditindak tegas, yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan, maka tidak signifikan pengembalian kerugian keuangan negara dan pemulihan ekonomi.

Dalam rilis capaian kinerja Kejaksaan Agung hingga semester pertama 2023, bidang Pidsus Kejaksaan Agung menangani perkara korupsi dengan total kerugian Rp152,2 triliun dan 61.948.551 dolar Amerika Serikat.

■ Zamzam

Judul	Penanganan Perkara Korupsi Kejaksaan Capai Rp 152 Triliun
Nama Media	Harian Terbit
Newstrend	Penanganan Perkara Korupsi Kejaksaan
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Penanganan Perkara Korupsi Kejaksaan Capai Rp 152 Triliun



KETUT SUMEDANA

ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung RI merilis gambaran kinerja jajaran kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi, hingga semester pertama tahun 2023, bidang pidana khusus (Pidus) menangani perkara dengan kerugian negara sebesar Rp152,2 triliun memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan nilai tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah perkara yang ditangani Bidang Pidus

tahun lalu hingga saat ini.

"Total kerugian negara yang berhasil ditangani Rp152,247 triliun dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat," kata Ketut dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ia menjelaskan, beberapa perkara korupsi mega korupsi sedang ditangani jajaran Pidus Kejaksaan Agung seperti proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) senilai Rp8,32 triliun, korupsi ekspor CPO atau minyak goreng Rp 6,47

triliun.

Kemudian perkara korupsi yang ditangani tahun lalu yang masih dalam proses upaya hukum seperti Duta Palma Grup, Jiwasraya, LPEI dan lainnya.

Ketut juga menyampaikan, Bidang Pidus Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 3.397 perkara dalam tahap eksekusi, dan 3.923 perkara di tahap penuntutan.

"Juga ada 2.117 perkara telah diselesaikan di tahap penyidikan," katanya.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu merincikan total kerugian negara yang berhasil ditangani Rp152,24 triliun dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat meliputi; pertama, mengembalikan kerugian keuangan negara Rp42,70 triliun, dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat.

Kedua, mengembalikan kerugian perekonomian negara Rp109,5 triliun, yang bersumber dari perkara PT AMU, LPEI, Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma Grup, Taspen dan BTS 4G Kominfo.

Selanjutnya, mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,82 triliun, serta penyelamatan dan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya Rp1,1 triliun.

Sementara itu di Bidang Pembinaan atau pemulihan aset Kejaksaan Agung menyelesaikan barang rampasan negara dan benda sitaan negara mencapai Rp4,88 triliun, penelusuran, pengamanan dan penyelesaian aset Rp 5 triliun, serta pendampingan dan pemulihan aset kementerian/lembaga sebesar Rp66,3 miliar.

■ Zamzam

Judul	Suntikan Modal Negara ke BUMN Bakal Molor
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kementerian Keuangan membahas PMN BUMN dengan Komisi XI
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

Suntikan Modal Negara ke BUMN Bakal Molor

Kementerian Keuangan akan membahas PMN BUMN dengan Komisi XI pada Agustus 2023

Siti Masitoh

JAKARTA. Pencairan penyerahan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) tahun ini agaknya bakal molor. Pasalnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum membahas suntikan modal untuk perusahaan pelat merah tersebut dengan Komisi XI DPR.

Di sisi lain, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengusulkan sejumlah BUMN untuk mendapatkan suntikan modal pada tahun ini. Usulan tersebut bahkan telah disepakati bersama Komisi VI DPR.

Usulan yang dimaksud, pertama, pada Juli tahun lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan 10 perusahaan milik negara mendapat kurungan dana dari pemerintah melalui mekanisme PMN. Usulan ini disepakati bersama Komisi IV DPR RI (*tihat tabel*).

Sayangnya, usulan tersebut tak semuanya disetujui Kemkeu. Melainkan, hanya empat BUMN, yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 28,9 triliun, PT Perusahaan Listrik negara (PLN) sebesar Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Rp 3,2 triliun. Nilai PMN untuk empat BUMN yang disetujui Kemkeu pun tak sesuai harapan Erick Thohir.

Kedua, pada Juni 2023, Menteri BUMN kembali membahas PMN BUMN bersama Komisi VI DPR. Ada empat BUMN yang diusulkan untuk mendapatkan PMN tahun ini. Keempatnya yaitu Indonesia Financial Group (IFG), In Journey, PT Reasuransi Indonesia Utama dan ID Food.

Keputusan PMN akan tergantung kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Rionald Silaban mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan persetujuan PMN BUMN pada tahun ini melalui rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Namun, pembahasan tersebut rencananya baru akan bergulir pada Agustus 2023 mendatang.

"Kami akan melakukan pencairan setelah kita melakukan

pendalaman ke Komisi XI DPR dan direncanakan Agustus akan ada pendalaman bagi masing-masing BUMN," ungkap Rionald dalam konferensi pers, Senin (24/7).

Alhasil, menurut dia, pencairan dana PMN diharapkan bisa berlangsung pada kuartal keempat mendatang. Itu pun setelah pemerintah rampung menyusun peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pencairan PMN untuk masing-masing BUMN tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengatakan, secara rutin dan terjadwal tahapan pemberian PMN kepada BUMN selalu dibahas di Komisi XI DPR.

Sementara, "Soal keputusan penambahan atau pengurangan pemberian PMN tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Penilaian BPK

Sebelumnya, pencairan dana PMN BUMN dipersoalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, lembaga audit negara tersebut menemukan ada sejumlah

proyek di 13 BUMN yang didanai melalui PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun belum diselesaikan hingga semester I-2022.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022, nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum

selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan Rp 424,11 miliar.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, BPK perlu mengaudit secara lebih terperinci terkait penggunaan dana PMN oleh BUMN, termasuk kesesuaian penggunaan dana dengan rencana proyek. "Kalau ada penyimpangan dana PMN, maka BUMN yang terlibat sebaiknya disetop dulu PMN tahun berjalan sebelum ada suntikan PMN baru. Kalau proyek belum selesai minta PMN lagi, tentu ini akan menggerus dana APBN," ucap Bhima. ■

Usulan PMN BUMN 2023 oleh Kementerian BUMN

- PT Hutama Karya Rp 30 triliun (disetujui Kementerian Keuangan Rp 28,9 triliun)
- PT PLN Rp 10 triliun (disetujui Kementerian Keuangan)
- In Journey Rp 7,5 triliun
- Indonesia Financial Group (IFG) Rp 6 triliun
- Defend ID Rp 3 triliun (disetujui Rp 1,75 triliun)
- ID Food Rp 2 triliun
- Perum Damri Rp 870 miliar
- Airnav Indonesia Rp 790 miliar
- PT KAI Rp 4,10 triliun (disetujui Rp 3,2 triliun)

Ket: PMN diusulkan oleh Kementerian BUMN dan telah disepakati dengan Komisi VI DPR pada Juli 2022.

Usulan Baru PMN BUMN 2023 oleh Kementerian BUMN

- Indonesia Financial Group (IFG) Rp 3 triliun
- In Journey Rp 1,19 triliun
- PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 1 triliun
- ID Food Rp 500 miliar

Ket: PMN diusulkan oleh Kementerian BUMN dan telah disepakati dengan Komisi VI DPR pada Juni 2023.

Sumber: Kementerian BUMN

Judul	Kewenangan OJK Digugat
Nama Media	Kontan
Newstrend	Gugatan kepada OJK
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	negative

Konter

Kewenangan OJK Digugat

JAKARTA. Kewenangan penyidikan tunggal yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang menggugat adalah aliansi korban Wanaartha Life.

Kewenangan OJK tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketua Aliansi Korban Wanaartha Johannes Buntoro mengatakan, pemberlakuan UU PPSK sejak Januari 2023 membuat permasalahan yang ada dalam industri keuangan sulit untuk diselesaikan.

Pasalnya, dengan hadirnya UU tersebut, kasus-kasus keuangan di kepolisian terhenti lantaran UU tersebut menasbihkan OJK sebagai penyidik tunggal. Ini mengakibatkan kepolisian jadi tidak punya kewenangan untuk menyelidiki kasus keuangan, seperti Wanaartha Life.

"Nantinya penjahat keuangan enggak akan bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi, yang boleh mempidanakan hanya OJK dengan UU PPSK," ujar Johannes.

Ferry Saputra

Judul	Kresna Life Mengajukan Nama Tim Likuidasi ke OJK
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kresna Life Mengajukan Nama Tim Likuidasi
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	neutral

■ LIKUIDASI KRESNA LIFE

Kresna Life Mengajukan Nama Tim Likuidasi ke OJK

JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) akhirnya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Agenda RUPS ini untuk membentuk tim likuidasi setelah izin perusahaan asuransi jiwa dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kuasa hukum nasabah Kresna Life Benny Wullur menyampaikan, RUPS diselenggarakan pada Jumat (21/7) lalu. Benny juga ikut diundang untuk berdiskusi selama RUPS tersebut.

RUPS ini menyetujui pembentukan tim likuidasi. Jika

tidak ada aral melintang, Huanala Hubudi akan menjadi ketua tim likuidasi.

"Ini pilihan terbaik dari para calon likuidator yang diseleksi. Dia menguasai pajak, ahli hukum pasar modal, kurator, dan pengurus, serta bersertifikat likuidator juga," ujar Benny, Senin (24/7).

Benny juga menyebut nama ketua tim likuidasi adalah usulan dari nasabah. Sementara Kresna Life akan memasukkan nama lain juga untuk mengisi tim likuidasi.

Benny juga menyampaikan bahwa manajemen Kresna

Life menyampaikan pembentukan tim likuidasi ini ke OJK pada Senin (24/7). Menurutnya, OJK bisa saja menolak tim likuidasi yang diajukan. Akan tetapi, dia optimistis tak akan ditolak OJK, karena sesuai dengan usulan para pemegang polis.

"Misal ditolak, nasabah akan bergerak. Wanaartha saja bisa disetujui, padahal timnya tak bersertifikat dan mantan karyawan. Kali ini perwakilan usulan nasabah. Misal enggak disetujui berarti ada apa dengan OJK? Berarti ada dugaan diskriminasi dan

keanehan," kata Benny.

Sayangnya, hingga berita ini naik cetak belum ada respons dari pihak OJK terkait tim likuidasi Kresna Life ini. Manajemen Kresna Life juga tidak merespon permintaan konfirmasi dari KONTAN.

Asal tahu saja, OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi milik Grup Kresna tersebut pada 23 Juni lalu. Alhasil, langkah Grup Kresna di bisnis asuransi jiwa tampaknya akan berakhir.

Alasan pencabutan izin tersebut adalah karena sampai batas akhir status pengawas-

an khusus, rasio kesehatan Kresna Life tetap tak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan. Per tahun 2021, *risk base capital* (RBC) Kresna Life minus 323%.

OJK telah memberikan waktu bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangan. Setelah izin dicabut, OJK memberikan waktu 30 hari untuk menyelenggarakan RUPS dan membentuk tim likuidasi, yang akan membereskan aset-aset dan kewajiban perusahaan ini.

Ferry Saputra

Judul	Tim Likuidasi Kresna Life Terbentuk
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Kresna Life Mengajukan Nama Tim Likuidasi
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

| ASURANSI BERMASALAH |

Tim Likuidasi Kresna Life Terbentuk

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life (Kresna Life) telah membentuk tim likuidasi sebagaimana diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pascapencabutan izin usaha.

Kuasa hukum korban Kresna Life Benny Wulur mengatakan pembentukan tim likuidasi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Menurutnya, nasabah ikut andil dalam mengusulkan nama tim likuidasi. Tim likuidasi usulan nasabah yang telah terpilih adalah Huakanala Hubudi, SH, SE, Ak, MAP, CA, BKP, CLA, CLI,CTL, CCL, ASEAN CPA.

“Ini yang terbaik dari para calon likuidator yang diseleksi. Beliau [Huakanala Hubudi] menguasai pajak, ahli hukum pasar modal, kurator dan pengurus, serta bersertifikat likuidator juga,” kata Benny kepada *Bisnis*, Senin (24/7).

Ketua Tim Likuidasi Kresna Life Huakanala Budi saat dihubungi mengatakan tim akan mulai bekerja setelah pembentukan dan pengangkatan tim likuidasi tersebut berlaku secara efektif, menunggu persetujuan dari pihak regulator.

“Setelah mendapat persetujuan dan berlaku efektif dari OJK, maka tim likuidasi akan mulai bekerja,” ungkap Huakanala.

Pada perkembangan lain

tentang Wanaartha Life, Ketua Tim Likuidasi Harvady Muhammad Iqbal mengatakan tim masih dalam proses pemeriksaan ulang dan verifikasi tagihan para kreditur, baik tagihan pemegang polis, karyawan, maupun kreditur lainnya.

Artinya, tim likuidasi Wanaartha Life masih berkutat pada tahap verifikasi dan belum memasuki tahap pembayaran ke pemegang polis Wanaartha Life.

“Belum masuk tahap pembayaran, tapi mudah-mudahan masih sesuai *timeline*,” kata Harvady kepada *Bisnis*.

Adapun per 21 Juli 2023, sebanyak 7.814 berkas pemegang polis telah diverifikasi dari 12.642 pemegang polis.

(Rika Anggraeni)

Menanti Nasib
Kresna Life &
Wanaartha Life
Lewat Likuidasi



Judul	Peringatan Presiden Jokowi
Nama Media	Kompas
Newstrend	Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63
Halaman/URL	Pg6
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	neutral

TAJUK RENCANA

Peringatan Presiden Jokowi



residen Joko Widodo memperingatkan jaksa agar tidak lagi ada upaya mempermainkan hukum, atau menitipkan rekanan proyek, atau menitip barang impor.

Peringatan Presiden Jokowi itu disampaikan pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63. Pada sisi lain, Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada kejaksaan karena kepercayaan publik yang meningkat.

Merujuk pada salah satu lembaga survei, kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung berada pada angka 81,2 persen. Sementara jika merujuk pada jajak pendapat Litbang *Kompas* yang dirilis Senin, 24 Juli 2023, sebanyak 74,2 persen responden menilai positif citra kejaksaan.

Kita garis bawahi peringatan dari Presiden Jokowi. Mengacu pada prinsip negara hukum, hukum tak boleh dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Meskipun Presiden berbicara pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, pesan itu juga disampaikan kepada aparat penegak hukum lain, termasuk kepada kepolisian.

Aparat penegak hukum juga harus berpegang teguh pada teks konstitusi, terutama Pasal 27 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Teks UUD 1945 itu jelas dan tegas, segala warga negara punya kesamaan di muka hukum. Artinya, penegakan hukum tak boleh diskriminatif dengan memandang siapa yang sedang berhadapan dengan hukum. Kejaksaan telah menunjukkan ketegasannya dengan membawa kasus asuransi besar Jiwasraya, Asabri, dan BUMN besar ke meja hijau.

Namun, publik kini masih menantikan bagaimana kejaksaan menelusuri kasus korupsi menara BTS 4G dengan tersangka (bekas) Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan kawan-kawan tanpa pandang bulu, tanpa ada perbedaan perlakuan. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan lugas, sesuai dengan bukti dan keterangan, dan bukan karena pertimbangan lain.

Kecepatan menuntaskan kasus korupsi BTS 4G yang merugikan negara Rp 8 triliun dari anggaran Rp 10 triliun diperlukan agar rakyat tidak dua kali menjadi korban. Korban dana pembangunan dikorupsi. Kerugian kedua, rakyat di perbatasan tidak bisa menikmati sinyal internet karena menara BTS yang mangkrak.

Jika merujuk lebih dalam hasil jajak pendapat *Kompas*, sebanyak 52,1 persen responden tidak puas terhadap kerja penuntutan yang dilakukan kejaksaan dan 41,2 persen puas, 45,8 persen tidak puas dengan cara kejaksaan menyidik dan 45,6 persen puas, sebanyak 66,6 persen tidak puas dalam memberantas korupsi dan 31,6 persen puas. Meski demikian, 80,1 persen responden yakin kejaksaan akan meningkatkan kinerjanya ke depan. Data persepsi publik itu bisa saja menjadi cermin bagi kejaksaan untuk memperbaiki diri.

Dengan tingkat keyakinan yang masih tinggi, kita berharap Kejaksaan Agung punya peran besar untuk mengukuhkan prinsip negara ini sebagai negara hukum dan bukan sebagai negara kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi.

Judul	Tantangan Program Restrukturisasi Perbankan
Nama Media	Kompas
Newstrend	Restrukturisasi sektor perbankan nasional
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

Tantangan Program Restrukturisasi Perbankan

Paul Sutaryono

Pengamat Perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009)

Dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan nasional, pada 16 Juni 2023 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

Apa implikasi peraturan pemerintah (PP) ini terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank, dan nasabah mereka?

Sesungguhnya, PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sarinya, UU itu menekankan upaya pencegahan krisis melalui penguatan industri perbankan, baik pada level individual bank maupun level industri perbankan. Penguatan industri perbankan ini bertujuan supaya penanganan masalah bank diutamakan dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan dari industri perbankan.

Pada level individual bank, penguatan dilakukan antara lain melalui penguatan bantalan likuiditas, khususnya untuk bank sistemik.

Pada level industri, penguatan dilakukan antara lain melalui program penjaminan simpanan yang diatur dalam UU tentang LPS.

Selain itu, UU tersebut pun mengatur upaya penanganan

krisis sistem keuangan dengan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Salah satu sumber PRP berasal dari kontribusi industri perbankan dalam bentuk premi PRP. Premi PRP itu merupakan bagian dari premi penjaminan yang dikenakan bank oleh LPS.

Bank yang wajib membayar premi PRP adalah setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa individu bank ikut bertanggung jawab atas kondisi industri perbankan yang sehat. Premi PRP dibayarkan pada waktu yang sama dengan pembayaran premi penjaminan.

Berdasarkan pada *benchmark* internasional, target pendanaan resolusi yang direkomendasikan adalah 2-4 persen dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2022.

Berapa besar premi PRP itu? Besaran premi PRP dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari kombinasi kelompok bank berdasarkan jumlah aset dan tingkat risiko bank dikalikan dengan jumlah aset bank.

Tingkat risiko bank adalah hasil penilaian akhir tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) berupa peringkat komposit.

Singkat kata, premi PRP berkisar dari 0,000 persen bagi bank dengan total aset sampai Rp 1 triliun dengan bank peringkat komposit 1-5, sampai dengan 0,055 persen bagi bank dengan total aset di atas Rp 100 triliun dengan bank peringkat komposit 2.

Artinya, makin tinggi peringkat komposit suatu bank, makin rendah potensi risiko suatu bank. Dengan bahasa lebih bening, bank dengan peringkat komposit 5 (paling tinggi) adalah bank paling rendah risiko-

nya sehingga premi PRP pun paling rendah (kecil).

Premi PRP dibayarkan pertama kali oleh bank kepada LPS terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Untuk menekan potensi risiko investasi, dana premi PRP hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan/atau pemerintah negara asing yang mata uangnya termasuk dalam *hard currency* yang memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*).

Implikasi PRP

Apa saja implikasi premi PRP bagi LPS, bank, dan nasabah bank di masa mendatang?

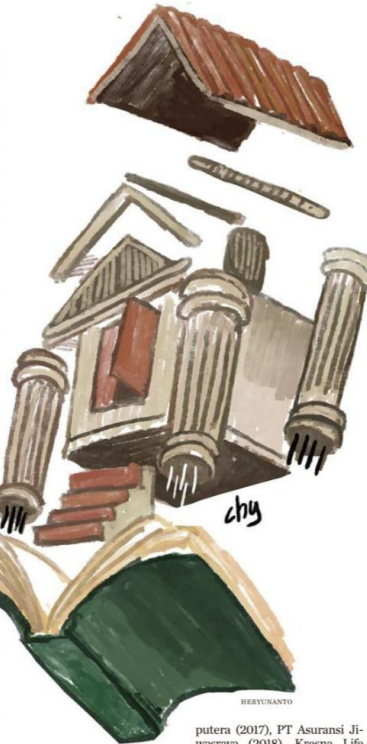
Pertama, sudah barang tentu, LPS akan semakin sibuk dengan adanya premi PRP sebagai bagian dari premi penjaminan LPS. LPS wajib menyiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan PRP, termasuk biaya yang menjadi beban operasional LPS.

Ada beberapa tugas LPS. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan simpanan.

Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Karena itu, LPS pun wajib menyiapkan manajemen sumber daya manusia (SDM). Hal itu bertujuan final supaya penyelenggaraan premi PRP dapat berjalan baik dan lancar.

Pada awal 2023, UU P2SK



HERYUNANTO

pun menitahkan LPS untuk menjamin polis asuransi lantaran mencuatnya aneka kasus perasuransian. Sebut saja, PT Bakri Life (2009), Asuransi Bumi Asih Jaya (2013), AJB Bumi-

putera (2017), PT Asuransi Jiwasraya (2018), Kresna Life (2019), PT Asabri (2019), Taspen Life (2021), dan Wanaartha Life (2022).

Mandat anyar itu bertujuan untuk menjamin pengembalian sebagian atau semua hak pemegang polis, tertanggung atau

peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izinnya atau dilikuidasi. Namun, penjaminan polis asuransi baru akan efektif lima tahun mendatang, tepatnya 12 Januari 2028.

Kedua, selama ini, bank telah membayar premi regulasi LPS dua kali dalam setahun dengan total 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, bank juga wajib membayar iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0,045 persen dari total nilai aset setiap tahun. Lengkap sudah kewajiban bank kepada regulator sehingga mungkin muncul resistansi.

Premi PRP itu bertujuan supaya bank mampu bertanggung jawab atas potensi risiko sendiri. Terlebih, ketika potensi risiko tersebut bisa membahayakan perekonomian nasional.

Satu hal penting yang harus diingat, kini pemerintah tidak lagi menanggung biaya penyelamatan bank yang bangkrut (*bail out*). Dengan demikian, bank sangat diharapkan menjadi semakin "dewasa".

Ketiga, pembayaran premi PRP baru akan dipungut dua tahun mendatang. Alhasil, bank masih memiliki waktu cukup untuk menyisihkan biaya untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi PRP. Lebih dari itu, premi PRP telah ditetapkan berbasis risiko masing-masing bank. Bukan sama rata.

Dampak ke bunga kredit

Keempat, ada hal yang mencemaskan ketika premi PRP itu akhirnya akan dibebankan kepada nasabah sebagai pengguna akhir (*user end*). Mengapa? Lantaran hal itu akan menambah beban perbankan yang bisa menambah biaya pembentukan suku bunga kredit. Selama ini, suku bunga kredit terbentuk oleh pajak, cadangan, biaya operasional, dan premi risiko (*risk premium*). Premi risiko itu tergantung pada kelompok nasabah ritel, menengah atau

korporasi.

Ketika biaya itu kelak dibebankan kepada nasabah, nasabah akan menghadapi kenaikan suku bunga kredit. Cepat atau lambat, kecemasan itu bisa menjadi kenyataan terlebih ketika suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed Fund Rate (FFR) terus naik hingga berkisar 5-5,25 persen sejak 4 Mei 2023.

Naikannya FFR itu bisa mendorong kenaikan suku bunga acuan BI (*BI 7-day reserve repo rate*) menjadi lebih tinggi lagi dari level saat ini 5,75 persen sejak 18 April 2023.

Kelima, bank, terutama bank pemerintah, sudah semestinya tetap menjaga fungsi mereka sebagai agen pembangunan. Dengan bahasa lebih lugas, bank pemerintah—PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN—sepatutnya tidak menaikkan suku bunga kredit terlalu tinggi dan cepat.

Oleh karena, jika itu dilakukan, akan mendorong kelompok bank lain untuk mengikuti bank pelat merah sebagai *trend setter*. Apalagi kini margin bunga bersih (*net interest margin/ NIM*) bank pemerintah 5,08 persen per April 2023, paling tinggi kedua setelah kelompok bank pembangunan daerah (BPD) 5,35 persen, di atas rata-rata industri 4,86 persen.

Coba bandingkan dengan NIM kelompok bank lain. NIM kelompok bank swasta nasional 4,63 persen dan kelompok bank berkedudukan dari bank yang berkedudukan di luar negeri 4,04 persen. NIM kedua kelompok bank itu di bawah rata-rata industri.

Singkatnya, boleh dikatakan pembayaran premi PRP itu bagi peribahasa berakir-rakir ke hulu, berenang-renang ke tepi; an; bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian.

Judul	IFG Life Bidik Bisnis Bancassurance
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kolaborasi PT Asuransi Jiwa IFG Life (IFG Life)
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

IFG Life Bidik Bisnis *Bancassurance*

JAKARTA, ID - Direktur Utama PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) Harjanto Tanuwidjaja menilai, kolaborasi antara para pelaku industri jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan asuransi dan bank, merupakan solusi strategis untuk meningkatkan cakupan asuransi bagi masyarakat.

Dia mengatakan, bank umumnya memiliki jaringan luas dan basis nasabah tradisional yang kuat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seiring dengan kebutuhan dasar masyarakat untuk melakukan transaksi, menyimpan dan meminjam uang. Adapun perusahaan asuransi, lanjutnya, memiliki produk yang memberi-

kan proteksi atau perlindungan yang dibutuhkan masyarakat atas berbagai jenis potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

"Oleh karena itu, kolaborasi antara asuransi dan bank menjadi salah satu poin strategis jika ingin mendorong cakupan asuransi di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia mana pun," kata Harjanto Tanuwidjaja, dikutip Senin (24/7/2023).

Ia mengatakan, IFG Life sendiri merupakan perusahaan asuransi anggota Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yang baru berusia 2,5 tahun. Didirikan pada 20 Oktober 2020 dan resmi mendapatkan izin operasional

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2021, IFG Life sedang terus melakukan ekspansi usaha untuk mewujudkan visinya memberikan layanan berbasis proteksi yang terpercaya dan terlengkap, serta memberikan perlindungan yang aman dan berkesinambungan terhadap rencana masa depan nasabah.

"Kami memulai dari asuransi digital untuk nasabah ritel. Mulai tahun kemarin, kami terus memperkuat serial produk Life-SERIES, salah satunya produk IFG LifeSAVER yang merupakan produk asuransi untuk para pegiat olahraga dan traveler. Ke depan, kami berencana masuk ke *bancassurance*," ujarnya. **(ks)**

Judul	Izin Asuransi Jiwa Dicabut, Kresna Life Bentuk Tim Likuidasi
Nama Media	Bali Tribune
Newstrend	Kresna Life Mengajukan Nama Tim Likuidasi
Halaman/URL	Pg9
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

Izin Asuransi Jiwa Dicabut, Kresna Life Bentuk Tim Likuidasi



LIKUIDASI - Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life (Kresna Life) telah menunjuk tim likuidasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Jakarta, Bali Tribune

Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life (Kresna Life) telah menunjuk tim likuidasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pada Jumat (23/6).

Kuasa Hukum korban Kresna Life Benny Wulur mengatakan bahwa nasabah ikut andil dalam mengusulkan nama tim likuidasi. Benny menyebut bahwa tim likuidasi usulan nasabah Kresna Life yang telah terpilih adalah Huakanala Hubudi. "Ini yang terbaik dari para calon likuidator yang diseleksi. Beliau [Huakanala Hubudi] menguasai pajak, ahli hukum pasar modal, kurator dan pengurus, serta bersertifikat likuidator juga," kata Benny seperti dilansir Bisnis.com, Senin (24/7).

Dihubungi terpisah, Ketua Tim Likuidasi Kresna Life Huakanala Budi mengatakan bahwa tim likuidasi baru akan mulai bekerja setelah pembentukan dan pengangkatan tim likuidasi tersebut berlaku secara efektif menunggu persetujuan dari pihak regulator. "Setelah

mendapat persetujuan dan berlaku efektif dari OJK, maka tim likuidasi akan mulai bekerja, memberikan paparan kepada publik secara transparan, serta akuntabel mengenai proses jalannya likuidasi terhadap AJK [Asuransi Jiwa Kresna]," ungkap Huakanala kepada Bisnis.

Lebih lanjut, Huakanala meminta dukungan dari semua pihak agar proses likuidasi Kresna Life bisa berjalan dengan lancar. Huakanala mengungkapkan bahwa nantinya susunan tim likuidasi Kresna Life mengacu pada POJK No. 28/POJK.05/2015. "Namun, jika sudah efektif, segera kami akan memberitahukan [susunan tim likuidasi Kresna Life], pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dengan dicabutnya izin usaha, maka Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha Kresna Life. Keputusan itu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa setelah OJK mencabut izin usaha, maka dalam waktu 30 hari, perusahaan harus dibubarkan dan dibentuk tim likuidasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. "Apabila dalam 30 hari perusahaan tidak membentuk, membubarkan perusahaan dan tidak dapat membentuk tim likuidasi, maka OJK berwenang untuk melakukan pembubaran perusahaan dan juga membentuk tim likuidasi," tutur Ogi dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/6).

Namun demikian, sambung Ogi, pemegang polis juga dapat menghubungi manajemen Kresna Life dalam rangka pe-

layanan konsumen sampai dengan dibentuknya tim likuidasi. Kemudian, tim likuidasi akan bertugas melakukan pembebasan harta dan penyelesaian kewajiban, termasuk kewajiban terhadap pemegang polis. Di samping itu, regulator juga telah menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS) selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan kepada pihak tertentu, yaitu Michael Steven selaku Pemegang Saham, Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, Antonius Indradi Sukiman selaku Direktur, serta Henry Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life. Lebih lanjut, Ogi menekankan bahwa OJK memberikan waktu selama 3 bulan kepada para pemegang saham, baik perusahaan maupun individu untuk melaksanakannya. "Apabila dalam waktu 3 bulan para pihak yang telah diberikan tertulis dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis, maka OJK akan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutup Ogi. **net**

Judul	Solusi Strategis Perluas Cakupan
Nama Media	Tribun Pekanbaru
Newstrend	Kolaborasi PT Asuransi Jiwa IFG Life (IFG Life)
Halaman/URL	Pg4
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

Solusi Strategis Perluas Cakupan

● IFG Life Tanggani Prospek Bisnis Bancassurance

JAKARTA, TRIBUN - PT Asuransi Jiwa IFG Life (IFG Life) menilai bahwa kolaborasi antara para pelaku industri jasa keuangan yaitu perusahaan asuransi dan bank merupakan solusi strategis untuk meningkatkan cakupan asuransi bagi masyarakat.

Penilaian IFG Life ini berkaitan dengan pangsa pasar Bancassurance Global yang diproyeksikan akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan tahunan 7,7% dalam 5 tahun mendatang.

Hasil studi Expert Market Research dalam laporan yang bertajuk "The Global Bancassurance Market Share, Size, Report, and Forecast 2023 - 2028" disebutkan bahwa market share bancassurance global akan tumbuh dengan CAGR (compounded annual growth rate) sebesar 7,7% pada periode 2023 - 2028.

Laporan tersebut juga mencatat

Expert Market Research tentang prospek pasar bancassurance global yang mencapai sekitar US\$ 1,46 miliar pada 2022, dan selanjutnya akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,70% antara tahun 2023 dan 2028 untuk mencapai nilai US\$ 2,25 miliar pada 2028.

Dalam laporan hasil studi tersebut juga dituliskan bahwa pasar bancassurance global dipimpin oleh kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020, dan kemungkinan akan melanjutkan dominasinya di periode 2023 - 2028.

"Karena kawasan ini akan memberikan beberapa peluang pertumbuhan kepada pelaku pasar," tulis laporan tersebut.

Negara berkembang di kawasan Asia Pasifik menjadi pendorong pertumbuhan pangsa pasar bancassurance global, hal ini dikarenakan standar hidup dan pertumbuhan kelas menengah ke atas dan secara bersamaan mengarah

pada pertumbuhan segmen tersebut.

Permintaan polis asuransi akan meningkat jika kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan juga mengalami peningkatan. Kehadiran asuransi membantu masyarakat dalam membayar biaya-biaya seputar kesehatannya, dan hal ini pula yang mendorong berkembangnya pasar bancassurance global.

Indonesia merupakan salah satu kawasan Asia Pasifik yang memberikan prospek baik di bisnis bancassurance ini.

Pengamat Asuransi dari Universitas Mercubuana Dedi D. Kristianto mengatakan bahwa prospek bancassurance di Indonesia bisa tumbuh secara signifikan di masa depan jika ditopang oleh sejumlah faktor pendukung.

Faktor tersebut antara lain penetrasi pasar asuransi yang masih sangat rendah yaitu di bawah 3% dari PDB. Kemudian, jumlah nasabah bank sangat besar yaitu mencapai 40 - 45 juta orang dan ini merupakan pangsa pasar yang memiliki potensi untuk digarap oleh perusahaan asuransi.

Dedi juga menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi sektor perasuransian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan environment bisnis pertumbuhan bancassurance di tahun-tahun berikutnya.

Direktur Utama IFG Life Harjanto Tanuwidjaja mengatakan bahwa bank umum memiliki jaringan luas dan basis nasabah tradisional yang kuat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, perusahaan asuransi juga memiliki produk yang memberikan proteksi atau perlindungan yang dibutuhkan masyarakat atas berbagai kemungkinan risiko yang terjadi di masa depan. **(kontan)**



FOTO/ ISTIMEWA

KOLABORASI- IFG Life menilai bahwa kolaborasi antara para pelaku industri jasa keuangan yaitu perusahaan asuransi dan bank merupakan solusi strategis untuk meningkatkan cakupan.

Judul	PruPrime Healthcare Plus Pro Syariah Hadirkan Manfaat hingga Rp 70 Miliar
Nama Media	Tribun Jateng
Newstrend	PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-25
Sentimen	positive

PruPrime Healthcare Plus Pro Syariah Hadirkan Manfaat hingga Rp 70 Miliar

SEMARANG, TRIBUN - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah sebagai produk asuransi tambahan untuk PRULink NextGen Syariah (PNGS).

Chief Financial Officer Prudential Syariah, Paul S Kartono mengatakan, inovasi itu sejalan dengan komitmen perseroan untuk menyediakan solusi perlindungan kesehatan berbasis syariah yang lebih lengkap bagi para peserta di seluruh Indonesia di setiap jenjang kehidupannya, termasuk bagi para peserta Semarang.

"Prudential Syariah berusaha untuk memahami dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis akan solusi perlindungan kesehatan," katanya, dalam peluncuran PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah di Semarang, Jumat (21/7).

Menurut dia, PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah dihadirkan dengan penawaran memberikan keuntun-

gan dengan batas manfaat hingga Rp 70 miliar. "Selain itu layanan lengkap dari prarawat inap hingga pemulihan, serta fleksibilitas dalam menentukan tipe kamar dan cakupan wilayah asuransi," jelasnya.

Paul menuturkan, PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah juga menawarkan beragam keunggulan lain, seperti manfaat biaya bedah rekonstruksi akibat kecelakaan atau kanker; manfaat telehealth di Indonesia, dan telehealth khusus perawatan kanker di Malaysia atau Singapura; manfaat psikiatri dan psikologis selama rawat inap dan rawat jalan.

Selain itu, manfaat perawatan paliatif (rawat inap dan rawat jalan) dan manfaat perawatan tradisional (rawat jalan) berdasarkan rekomendasi dari dokter; dan santunan Dana Marhamah sebesar Rp 15 juta yang akan dibayarkan apabila peserta yang diasuransikan meninggal. Saat ini, Paul menyatakan, Prudential Syariah me-

miliki PRUMedical Network dengan 713 rekanan rumah sakit di Indonesia, dan 3.303 rekanan rumah sakit di luar negeri. Melalui keunggulan PRUMedical Network di Indonesia, peserta juga bisa mendapatkan fasilitas free room upgrade. Produk ini juga menyediakan layanan black card, sehingga peserta dapat melakukan transaksi secara cashless.

Berdasarkan data dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, tercatat pada 2022 kasus penyakit katastropik (penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, dan lainnya) di Indonesia meningkat sebesar 23,3 juta kasus, atau 18,6 persen lebih tinggi dari 2021.

Data Dinas Kesehatan Jateng mencatat persentase penduduk di Kota Semarang yang melakukan rawat inap meningkat dari sebelumnya 52,83 persen di 2018 menjadi 84,03 persen di 2019. Diperkirakan jumlah itu akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. (idy)

Judul	Ulang Tahun Ke-Dua: blu Bawa Semangat Kolaborasi #Better2Gether, blu by BCA Digital Ajak Sobatblu Seru-Seruan di Akhir Pekan
Nama Media	gramediapost.com
Newstrend	blu by BCA Digital kolaborasi bertajuk #Better2Gether
Halaman/URL	https://www.gramediapost.com/2023/07/ulang-tahun-ke-dua-blu-bawa-semangat-kolaborasi-better2gether-blu-by-bca-digital-ajak-sobatblu-seru-seruan-di-akhir-pekan/
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Ulang Tahun Ke-Dua: blu Bawa Semangat Kolaborasi #Better2Gether, blu by BCA Digital Ajak Sobatblu Seru-Seruan di Akhir Pekan

Penulis **GramediaPost** - Senin, 24 Juli 2023 | 05:43

👁 41 💬 0



Memasuki usia yang ke dua tahun, **blu by BCA Digital** terus berupaya menyediakan solusi keuangan yang relevan, terintegrasi, mudah, dan anti-ribet untuk berbagai kebutuhan finansial nasabah. Agar bisa terus mendukung semua kebutuhan finansial dan selalu **#SiapJadiPegangan** para sobatblu, blu by BCA Digital mengusung semangat kolaborasi bertajuk **#Better2Gether**, untuk mengapresiasi nasabah dan mitra blu yang telah setia mendukung blu by BCA Digital selama dua tahun ini.

Judul	BRI Life Perkuat Kolaborasi dengn Mitra Rumah Sakit
Nama Media	kontan.co.id
Newstrend	Kolaborasi BRI Life dengan Mitra Rumah Sakit
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-life-perkuat-kolaborasi-dengn-mitra-rumah-sakit
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

BRI Life Perkuat Kolaborasi dengn Mitra Rumah Sakit

Senin, 24 Juli 2023 / 12:53 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi BRI Life (BRI Life) terus memperkuat kolaborasi dengan mitra sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan bisnis. Termasuk memperkuat sinergi dengan rumah sakit.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila menjelaskan, kerjasama antara perusahaan asuransi dengan mitra rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengelola biaya kesehatan yang efisien.

Tren inflasi biaya medis di Indonesia mencapai sekitar 2 – 3 kali inflasi umum dalam 10 tahun terakhir menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi bersama oleh Perusahaan asuransi dan rumah sakit rekanan.

Judul	Astra Life dan PermataBank Luncurkan AVA iVantage Platinum Protection
Nama Media	besttangsels.com
Newstrend	Kolaborasi Astra Life dan PermataBank Luncurkan AVA iVantage Platinum Protection
Halaman/URL	https://www.besttangsels.com/astra-life-dan-permatabank-luncurkan-ava-ivantage-platinum-protection/
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Astra Life dan PermataBank Luncurkan AVA iVantage Platinum Protection

□ 24 Juli 2023



BESTTANGSEL.COM, JAKARTA- Berdasarkan data kuartal I 2023 yang dirilis oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) masih mendominasi pendapatan premi industri asuransi jiwa sebesar lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa PAYDI masih menjadi produk yang diminati oleh masyarakat. Di sisi lain, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5 tahun 2022 tentang PAYDI yang saat ini telah berlaku juga diharapkan dapat mengoptimalkan aspek perlindungan dan kepentingan nasabah, sehingga minat masyarakat untuk memiliki PAYDI juga dapat semakin ditingkatkan.

Stephanie Arvianti Gunadi selaku Direktur Astra Life menuturkan, “Kami optimis bahwa pemberlakuan SEOJK Nomor 5 tahun 2022 dapat kembali mendorong sentimen positif masyarakat terhadap produk PAYDI. Semangat optimis ini pun kami implementasikan dengan memprioritaskan aspek perlindungan nasabah serta memastikan end to end process mulai dari pembelian polis hingga layanan pemeliharaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”. Senin, (24/07).

Judul	Astra Life Luncurkan Produk Unit Link Baru: ASLI Proteksi Andalan
Nama Media	beritainn.com
Newstrend	Astra Life Luncurkan Produk Unit Link Baru
Halaman/URL	https://www.beritainn.com/economic-and-busines/astra-life-luncurkan-produk-unit-link-baru-asli-proteksi-andalan.html
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Astra Life Luncurkan Produk Unit Link Baru: ASLI Proteksi Andalan



Redaksi

24 Juli 2023 12 Dilihat



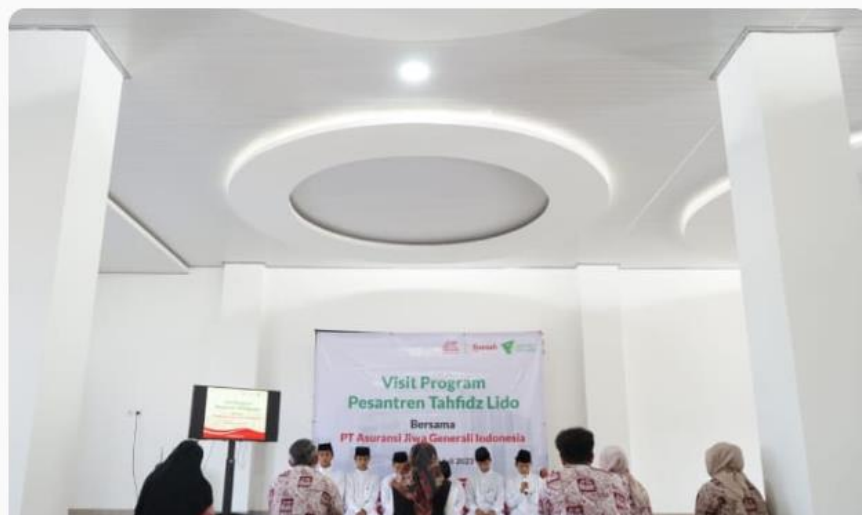
Jakarta, Beritainn, – Berdasarkan data kuartal I-2023 yang dirilis oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi masih mendominasi pendapatan premi industri asuransi jiwa sebesar lebih dari 50% meskipun proporsi jumlah produknya tidak sebanyak produk asuransi tradisional.

Selain itu, diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi juga mencerminkan adanya dukungan dari regulator untuk pengembangan PAYDI guna meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis.

Judul	Generali Indonesia Apresiasi Pesantren Tahfidz Berbasis Wakaf Dompot Dhuafa
Nama Media	dompetdhuafa.org
Newstrend	Generali Indonesia Apresiasi Pesantren Tahfidz
Halaman/URL	https://www.dompetdhuafa.org/generali-indonesia-apresiasi-pesantren-tahfidz-berbasis-wakaf-dompet-dhuafa/
Tanggal Berita	2023-07-24
Sentimen	positive

Generali Indonesia Apresiasi Pesantren Tahfidz Berbasis Wakaf Dompot Dhuafa

📅 24 JULI 2023, 16:44



SUKABUMI, JAWA BARAT — Usai berhasil menjalankan sekolah berbasis wakaf dengan baik, yakni sekolah SMART Ekselensia Indonesia di Bogor, Dompot Dhuafa terus mengembangkan atmosfer wakaf pada sektor pendidikan. Pada tahun 2019, di sebuah lahan wakaf seluas 2,2 hektar di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Dompot Dhuafa mulai membangun sebuah pesantren tahfidz berbasis wakaf.

Pembangunan pesantren tahfidz ini terus berkembang serta berhasil menarik perhatian para pegiat wakaf, salah satunya PT Asuransi Generali Indonesia. Pada Kamis (20/7/2023), Head of Sharia Ecosystem & Partnership Unit Syariah PT Asuransi Generali Indonesia, Agus Ismail beserta jajarannya melakukan kunjungan program terhadap Pesantren Tahfidz Green Lido (PTGL) Dompot Dhuafa. Kunjungan ini disambut baik oleh Direktur Mobilisasi dan Sumber Daya Dompot Dhuafa, Etika Setiawanti beserta jajarannya.